

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Sesuai dengan pemaparan di atas, setelah dianalisis menggunakan teori implementasi Grindle, untuk mengukur keberhasilan proses implementasi dapat dilihat dari dua hal, yaitu proses implementasi kebijakan dan apakah tujuan kebijakan tersebut sudah tercapai sesuai dengan desain kebijakannya. Melalui proses implementasi kebijakan, ada dua variabel yang bisa digunakan. Yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel lingkungan kebijakan (*context of policy*). Variabel isi kebijakan terdiri dari beberapa indikator yaitu: *interests affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), *type of benefits* (tipe manfaat), *extent of change envisioned* (derajat perubahan yang ingin dicapai), *site of decision making* (letak pengambilan keputusan), *program implementors* (pelaksana program) dan *resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan). Sementara variabel lingkungan kebijakan terdiri dari tiga indikator yaitu Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (*Power, interest, and strategic of actors involved*), Karakteristik rezim dan institusi (*Institution and regime characteristic*) dan Kepatuhan dan sifat responsif (*Compliance and responsiveness*).

Secara keseluruhan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru sudah baik. Dilihat dari variabel isi kebijakan (*content of policy*) implementasi PKH di Kota Pekanbaru sudah baik, hanya saja masalah terjadi pada indikator tipe manfaat

(*type of benefit*) dimana, program ini masih diterima oleh orang-orang yang sudah tidak layak untuk mendapatkan program ini dan masih ada orang-orang yang layak menerima tetapi ia tidak menerima program ini, sehingga manfaat yang seharusnya dirasakan oleh orang-orang miskin yang berada pada desil 1 kemiskinan menjadi tidak dirasakan sepenuhnya. Selanjutnya permasalahan pada indikator tipe manfaat juga berkesinambungan pada indikator derajat perubahan yang diinginkan (*extend of change envisioned*) dimana perubahan yang diinginkan dari adanya PKH yaitu untuk mengubah pola pikir KPM PKH untuk tidak ketergantungan dengan program penanggulangan kemiskinan yang ada. Namun faktanya masih ada KPM yang sudah tidak layak menerima PKH tetapi tidak mau melakukan graduasi mandiri sehingga indikator ini belum terlaksana dengan sepenuhnya. Masalah selanjutnya terjadi pada indikator sumber-sumber daya yang digunakan (*resources committed*). Dimana dalam implementasi PKH di Kota Pekanbaru hanya memiliki sumber daya manusia tetapi tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mempunyai.

Sementara itu, dari variabel lingkungan kebijakan (*context of policy*), implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, dimana masing-masing aktor memiliki strategi masing-masing untuk mengimplementasikan PKH tersebut. Selanjutnya implementasi PKH juga didukung baik secara moril oleh walikota Pekanbaru sehingga dalam implementasinya PKH tidak berjalan sendirian. Dari segi kepatuhan dan daya tanggap implementor terhadap program, menurut peneliti implementor belum bisa dikatakan sepenuhnya patuh terhadap program yang sedang ia jalankan.

Dimana masih peneliti temukan tugas-tugas implementor yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Jika dilihat dari hasil akhir (*outcomes*) dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru, dapat dikatakan sudah baik tetapi belum sepenuhnya berhasil. Dampak yang ditimbulkan dari adanya implementasi PKH di Kota Pekanbaru serta penerimaan masyarakat menunjukkan hasil yang positif namun tingkat perubahan yang terjadi belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa perubahan yang diinginkan dari implementasi PKH yaitu merubah mindset KPM untuk tidak ketergantungan terhadap kemiskinan belum terlaksana seutuhnya, hal ini dikarenakan masih ditemukan KPM-KPM yang sudah tidak layak untuk memperoleh PKH tetapi tidak mau melakukan graduasi mandiri. Namun, jika diukur dari tujuan PKH yaitu mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Pekanbaru, maka dapat dikatakan bahwa PKH telah berkontribusi untuk membantu mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kota Pekanbaru.

6.2. Saran

Berdasarkan penelitian dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran yang bisa peneliti sampaikan, yaitu:

1. Perlunya koordinasi yang lebih baik dari pendamping PKH terhadap perangkat pemerintah terendah seperti RT/RW dan kelurahan setempat

agar bisa membantu untuk merekomendasikan warganya yang lebih berhak menjadi KPM PKH

2. Perlunya penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai Program Keluarga Harapan ini agar tidak terjadi pemahaman yang multitafsir
3. Perlunya data kemiskinan yang *up to date* untuk menghindari terjadinya penerima yang tidak tepat sasaran

Perlunya ketegasan dari sanksi yang akan diberikan kepada KPM maupun pendamping yang tidak melaksanakan kewajibannya.

